

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 TERTENTU GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI
 PROVINSI RIAU

**INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG PULAU BATUMANDI, PULAU RUPAT, PULAU
 BENGKALIS DAN PULAU RANGSANG**

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
1.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
A.	Sistem Jaringan Transportasi Laut								
a)	Pembangunan dermaga	Pulau Batumandi	Kementerian PUPR, Kementerian Pehubungan, Pemda beserta unit organisasi pelaksana	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
b)	Pembangunan SBNP berupa Menara Suar	Pulau Batumandi	Kementerian PUPR, Kementerian Pehubungan,	APBN, APBD, dan atau kerjasama					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
			Pemda beserta unit organisasi pelaksana	pendanaan					
c)	Penetapan alur pelayaran	Pulau Rupa, Pulau Batumandi, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Kementerian Perhubungan beserta unit organisasi pelaksana	APBN					
d)	Revitalisasi dan penguatan fungsiasarana penunjang kenavigasian	Pulau Rupa, Pulau Batumandi, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Kementerian Perhubungan beserta unit organisasi pelaksana	APBN dan/atau kerjasama pendanaan					
e)	Pengendalian aktivitas pelayaran dan pendaratan di luar pelabuhan dan terminal resmi	Pulau Rupa, Pulau Batumandi, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Kementerian Perhubungan beserta unit organisasi pelaksana	APBN dan/atau kerjasama pendanaan					
B	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
a)	Pembangunan dan pengembangan	Pulau Batumandi	Kemkominfo beserta unit	APBN dan/atau					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
	prasarana komunikasi nirkabel untuk piranti komunikasi dan jaringan operator		organisasi pelaksana	kerjasama pendanaan					
b)	Pembangunan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> dengan tenaga surya	Pulau Batamandi	Kemkominfo beserta unit organisasi pelaksana	APBN dan/atau kerjasama pendanaan					
2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN								
	Kawasan Budidaya	Pulau Batamandi							
	Zona Pertahanan dan Keamanan								
a)	Sosialisasi rencana zonasi RZ KSNT Gugus PPKT Riau	Lampiran III dan IV	BNPP, Kemenhan	APBN					
b)	Pembangunan tanda simbol/batas negara	Lampiran III dan IV	BNPP, Kemenhan	APBN					
c)	Penyediaan ruang untuk pertahanan keamanan dan latihan militer	Lampiran III dan IV	Kemenhan	APBN					
d)	Penempatan pos pertahanan kemanan dan sarana pendukung	Lampiran III dan IV	BNPP, Kemenhan	APBN					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
	lainnya								
e)	Revitalisasi sarana dan prasarana pertahanan keamanan	Lampiran III dan IV	Kemenhan	APBN					
3	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT								
1	Zona Pelabuhan								
a)	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan	Lampiran III dan IV	Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, beserta unit organisasi pelaksana	APBN					
b)	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan dikawasan perairan di sekitar Kecamatan Rupat Utara, Bantan dan Rangsang Pesisir	Lampiran III dan IV	Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, beserta unit organisasi pelaksana	APBN					
c)	Pembangunan sarana penunjang kepelabuhan dan penataan bangunan di wilayah pelabuhan	Lampiran III dan IV	Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, beserta unit organisasi pelaksana	APBN					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
d)	Pengelolaan area tambat labuh dan lego jangkar	Lampiran III dan IV	Kemenuh, KKP, Kemen BUMN, beserta unit organisasi pelaksana	APBN					
e)	Pengembangan dan peningkatan transportasi laut sebagai penunjang sistem logistik	Lampiran III dan IV	Kemenuh, KKP, Kemen BUMN, beserta unit organisasi pelaksana	APBN					
f)	Pengembangan jasa-jasa kelautan	Lampiran III dan IV	Kemenuh, KKP, Kemen BUMN, Pemda beserta unit organisasi pelaksana	APBN, APBD dan investasi/kerjasama					
2	Zona Perikanan Tangkap								
a)	Pengalokasian ruang untuk kegiatan perikanan tangkap pada sebagian perairan KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
b)	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, daerah larangan penangkapan, metode penangkapan ikan, dan alat	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
	penangkapan ikan								
c)	Pengawasan kegiatan penangkapan ikan dan pencegahan tindakan tindak pidana penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai ketentuan penangkapan ikan	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
3	Zona Perikanan Budidaya								
a)	Pengalokasian ruang untuk kegiatan budidaya perairan di sekitar Kecamatan Rupa Utara, Rupa dan Bengkalis	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
b)	Sosialisasi mengenai zona budidaya perairan dan metode budidaya yang diizinkan	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
c)	Pengembangan budidaya ikan skala kecil	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
			masyarakat						
d)	Pengembangan budidaya rumput laut	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
4	Zona Pariwisata								
a)	Pengalokasian ruang untuk kegiatan pariwisata bahari pada perairan di sekitar Kecamatan Rupal Utara, Pupal dan Bantan	Lampiran III dan IV	Kementerian Pariwisata, KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
b)	Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	Lampiran III dan IV	Kemenpar, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
c)	Penyusunan paket kegiatan pariwisata ekowisata	Lampiran III dan IV	Kemenpar, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
d)	Pelatihan pengelolaan wisata masyarakat	Lampiran III dan IV	Kemenpar, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
e)	Pembangunan akomodasi wisata	Lampiran III dan IV	Kemenpar, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
f)	Pembangunan sarana umum untuk kegiatan wisata	Lampiran III dan IV	Kemenpar, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
5	Zona Pertahanan dan Keamanan								
a)	Penetapan dan penentuan lebar laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
b)	Penyediaan ruang untuk pertahanan dan keamanan	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
			masyarakat						
c)	Kerjasama dengan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan di laut	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
d)	Peningkatan dan memperkuat peralatan radar militer di PPKT	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
e)	Penyediaan ruang laut untuk pengelolaan penenggelaman kapal dan pembuangan amunisi	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
2	Kawasan Konservasi Perairan								
a)	Pemantapan tata batas kawasan konservasi perairan	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
b)	Penyusunan Rencana	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit	APBN, APBD, dan					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
	Pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi dan regulasi pendukung		organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	atau kerjasama pendanaan					
d)	Sosialisasi mengenai konservasi perairan dan alur migrasi biota	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
e)	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, daerah larangan penangkapan, metode penangkapan ikan, dan alat penangkapan ikan	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
f)	Pembentukan kelembagaan konservasi/patrol pengelolan zona perlindungan dan pelestarian biota migrasi langka	Lampiran III dan IV	KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
3	Alur Laut								
a)	Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran		Kemenhub, Pemda beserta unit organisasi	APBN, APBD, dan atau					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
			pelaksana dan/atau masyarakat	kerjasama pendanaan					
b)	Pemantapan tata batas untuk alur pelayaran yang terbagi menjadi alur pelayaran internasional, koridor pelayaran NKRI dan Malaysia, alur pelayaran nasional, alur pelayaran regional, alur pelayaran lokal, alur pelayaran lokal untuk kegiatan kepariwisataan		Kemenhub, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
c)	Menyediakan alur perikanan tradisional		KKP, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
c)	Menyediakan ruang untuk alur kabel bawah laut untuk kegiatan ketenagalistrikan		ESDM, Kemenhub, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
d)	Menyediakan ruang untuk alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi		ESDM, Kemenhub, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
e)	Pengamanan dan pengelolaan jalur kabel listrik dan kabel telekomunikasi bawah laut		ESDM, Kemenhub, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
f)	Identifikasi kabel bawah laut eksisting dan rencana pemasangan pipa kabel bawah laut		ESDM, Kemenhub, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
g)	Penentuan koridor pemasangan atau penempatan kabel bawah laut		ESDM, Kemenhub, Pemda beserta unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	APBN, APBD, dan atau kerjasama pendanaan					
h)	Pendataan kegiatan pemasangan, penempatan,		ESDM, Kemenhub, Pemda beserta	APBN, APBD, dan atau					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
					(2019)	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2038)
	perbaikan, perawatan dan/atau pembongkaran kabel bawah laut		unit organisasi pelaksana dan/atau masyarakat	kerjasama pendanaan					

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PRL	
3.	Kepala BHO	
4.	Direktur PRL	